



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Efektivitas Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2
di Era New Normal pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor**

Oleh:

Julia Rachmandini

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Kebijakan Relaksasi PBB P-2 dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah Wajib Pajak di saat era new normal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor merupakan salah satu institusi yang menerapkan kebijakan relaksasi PBB P-2 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 – 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan kebijakan relaksasi PBB P-2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis efektivitas penerapan kebijakan PBB P-2 dengan model implementasi George Edward III dan perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB P-2 saat diterapkan kebijakan relaksasi PBB P-2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi PBB P-2 berdasarkan model implementasi George Edward III masih belum efektif secara keseluruhan. Namun, berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan PBB P-2 di era new normal sudah termasuk kriteria sangat efektif. Kebijakan relaksasi PBB P-2 sangat mempengaruhi penerimaan PBB P-2 dengan diberlakukannya pengurangan tarif pokok pada tahun berjalan dan penghapusan denda serta diskon pokok untuk pembayaran piutang PBB P-2 di tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan walaupun dengan diberlakukannya relaksasi pajak, pemerintah Kabupaten Bogor tetap berhasil melampaui target penerimaan yang nantinya berguna untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor.

**NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The Effectiveness of Implementing The Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2) Relaxation Policy in the New Normal Era at the Bogor Regency Regional Revenue Management Agency

By:

Julia Rachmandini

D4 Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2) Relaxation Policy was issued by the local government to facilitate taxpayers in the new normal era. The Bogor Regency Regional Revenue Management Agency is one of the institutions that implement PBB P-2 relaxation policy in Bogor Regency in the period 2020 – 2022. This research aims to evaluate the effectiveness of the PBB P-2 relaxation policy. This research used qualitative research methods. This research was conducted by analyzing the effectiveness of implementing the PBB P-2 relaxation policy using the George Edward III model and calculating the level of effectiveness of PBB P-2 revenues when the tax relaxation policy was implemented. The results is indicate that the relaxation policy based on the George Edward III model is still not overall effective. However, based on the calculation of the effectiveness, PBB P-2 revenues in the new normal era is very effective. The relaxation policy greatly affected tax revenue due to reduction of rate and the elimination of fines and discounts of tax receivables in previous years. It can be concluded that despite the implementation of tax relaxation, the Bogor Regency government has suprassed the revenue target which can be used to fund regional development.

Keywords: *Relaxation Policy, Local Tax, Rural And Urban Land And Building Tax, Effectiveness, New Normal.*

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA